PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

TINDAK LANJUT TERHADAP MONITORING DAN EVALUASI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TRIWULAN IV TAHUN 2021

TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2021

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu terhadap 119 responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu dan memperoleh hasil survey persepsi anti korupsi **4.00** atau masuk pada kategori **bersih dari korupsi.**

Hasil survey persepsi anti korupsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	4.00	0.400	100
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	0.400	100
3.	Menjual Pengaruh	4.00	0.400	100
4.	Transparansi Biaya	3.992	0.399	99.8
5.	Biaya Tambahan	4.00	0.400	100
6.	Hadiah	4.00	0.400	100
7.	Transaksi Biaya	4.00	0.400	100
8.	Percaloan	3.983	0.398	99.57
9.	Perbuatan Curang	3.983	0.398	99.57
10.	Transaksi Rahasia	4.00	0,400	100
IPK		**4.00**		

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi anti korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Percaloan dengan indeks 3.983
2. Perbuatan Curang dengan indeks 3.983
3. Transparansi Biaya dengan indeks 3.992

B. TINDAK LANJUT

- **3 (tiga) unsur yang bernilai rendah tersebut di atas telah dilakukan tindak lanjut dengan cara :**

1. Percaloan

Terhadap unsur percaloan, masyarakat yang menjawab bahwa adanya unsur percaloan tentunya masyarakat tersebut telah berhubungan langsung dengan oknum yang berada di Pengadilan, menggunakan orang lain untuk mengurus perkaranya atau hanya mendapatkan informasi dari orang lain. Terlepas dari hal tersebut diatas, Pengadilan tetap bertindak sesuai dengan ketentuan, bahwa penerima layanan dapat bertanya langsung kepada petugas layanan yang telah berada di front office yang telah tersedia sebagai petugas PTSP. Hal-hal yang ingin diketahui tentang perkara akan langsung dilayani oleh petugas PTSP di bidang Kepaniteraan yaitu pada bidang Perdata, Pidana maupun bidang Hukum yang telah tersedia;

Perlu dilakukan sosialisasi kepada penerima layanan bahwa di Pengadilan Negeri Meureudu telah menyediakan informasi tentang ketentuan berperkara yang dapat dilihat secara transparan baik melalui Website, media sosial, bahkan pada banner maupun selebaran yang telah tersedia pada Pengadilan Negeri Meureudu, Sehingga penerima layanan tidak perlu mencari calo untuk mengurus perkaranya. Oleh karena itu penerima layanan akan lebih mudah dalam mencari informasi terkait dengan ketentuan berperkara. Pengadilan Negeri Meureudu juga telah meningkatkan pelayanannya, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Petugas layanan, maka penerima layanan juga akan diberikan kompensasi.

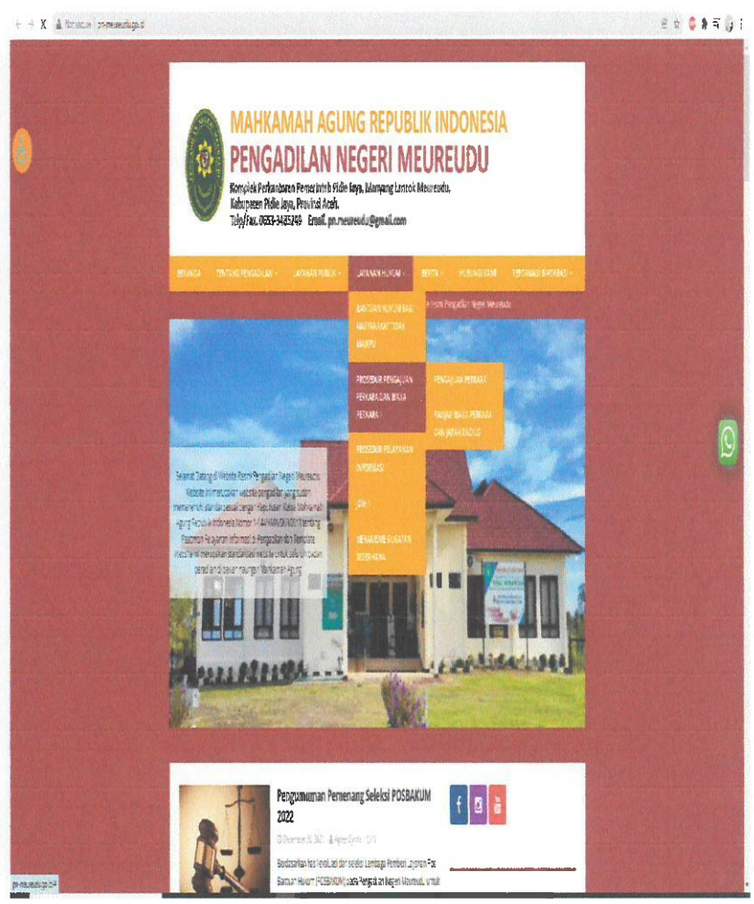

Foto : Website dan media sosial Pengadilan Negeri Meureudu

Foto : Lemari Kompensasi Pelayanan

2. Perbuatan Curang

Berdasarkan hasil responden indikator perbuatan curang merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Adapun terhadap unsur tersebut responden tentunya melihat / mendengar informasi tentang adanya praktek KKN di Pengadilan, namun hal tersebut telah diminimalisir agar tidak ada praktek KKN di Pengadilan. Untuk meminimalisir adanya praktek KKN umumnya dilingkungan Mahkamah Agung untuk setiap perekrutan CPNS maupun tenaga kontraknya telah diumumkan secara online dan transparan. Bahkan untuk menjadi CPNS Pengadilan sistemnya langsung gugur dalam proses sistem CAT. Sedangkan untuk pemilihan tenaga kontrak/Honorer pada Pengadilan Negeri Meureudu telah ditetapkan berdasarkan monitoring dan evaluasi Kesekretariatan. Untuk kebutuhan tenaga kontrak/honorer maka dapat dilihat dan akan diumumkan secara online pada website Pengadilan Negeri Meureudu;

Apabila masyarakat ada yang memiiliki bukti-bukti adanya praktek KKN pada Pengadilan Negeri Meureudu, maka dapat dilaporkan melalui pengaduan, baik melalui website maupun langsung ke Pengadilan Negeri Meureudu. Akan ada Petugas bagian Pengaduan yang akan menjelaskan prosedur dan mekanismenya.

Foto : Pengaduan Layanan Publik dan Siwas pada Website

3. Transparansi Biaya

Berdasarkan hasil responden indikator Transparansi Biaya merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Bahwa terhadap indikator tersebut, tentunya ada responden yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan khususnya mengenai informasi tentang tarif/biaya oleh petugas layanan. Terhadap responden yang tidak puas terhadap informasi tarif/biaya tersebut tidak diketahui secara jelas apakah responden menganggap tarif/biaya perkara tersebut mahal atau menganggap informasi tentang tarif/biaya yang tidak sesuai dengan ketentutan yang telah ditetapkan. Karena terkadang para penerima layanan menganggap bahwa perkara permohonan maupun gugatan biayanya sama. Oleh karena itu, petugas layanan telah menjelaskan tentang tarif/biaya yang akan dibayarkan oleh penerima layanan.

Untuk itu Kasir atau petugas yang telah selesai memberikan pelayanan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu dan hendak memungut biaya resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku telah memberikan informasi mengenai biaya-biaya resmi yang akan dikeluarkan oleh pengguna layanan dan mengenai biaya/tarif resmi ini juga sudah dimuat dalam website Pengadilan Negeri Meureudu.

Foto : Informasi Biaya resmi yang ada pada Meja PTSP

Foto : Informasi Panjar Biaya Perkara yang terdapat pada lobi tunggu Pengadilan Negeri Meureudu

Meureudu, 31 Desember 2021

Ketua Tim Survey

Zulfikaruddin, S.H.